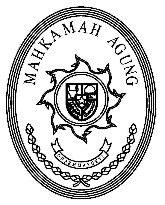
|  |  |
| --- | --- |
|  | **MAHKAMAH AGUNG RI**  **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : 3843348, 3810350, 3457661 FAX.3810361  TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10110 |



**BERITA ACARA**

**EVALUASI RKBMN, PENYUSUNAN SBSK,**

**PENERTIBAN PENCATATAN ASET DAN UPDATE PSP**

**PADA …..(NAMA SATUAN KERJA)…..**

Pada hari ini, ***Selasa*** tanggal ***Empat*** bulan ***April*** tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Tiga***, dilakukan evaluasi RKBMN, penyusunan SBSK, penertiban pencatatan aset dan update PSP pada ……(nama satuan kerja)……. sesuai dengan Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 61/BUA.4/ST/03/2023 tanggal 21 Maret 2023.

Kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sekretaris/……(nama satuan kerja)…, dan Operator BMN/……(nama satuan kerja)……, dengan catatan sebagai berikut:

1. Terdapat pencatatan barang berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen lebih dari satu NUP (dalam satu fungsi dan satu lokasi), belum update PSP;
2. Terdapat profil aset dan keterangan pendukung yang belum update (bangunan gedung kantor/kendaraan/rumah negara/tanah/dan lainnya);
3. Terdapat aset tanah belum bersertifikat, belum PSP, penyajian SBSK (tanah bangunan Gedung kantor/tanah rumah negara/tanah bangunan sidang);
4. Terdapat rumah negara belum update sesuai kondisi rill, belum menyajikan SBSK, tidak sesuai dengan eselonisasi (peruntukannya);
5. Terdapat kendaraan dinas jabatan yang sudah melebihi 5 tahun dari tahun perolehan, belum update kondisi, belum update PSP, kendaraan dinas jabatan berupa kendaraan bermotor roda dua;
6. Terdapat beberapa Rencana Umum Pengadaan di fitur Evaluasi Pengadaan belum diupdate data pelaksanaannya (proses pengadaan/pengisian data) oleh satuan kerja.

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, dapat kami rekomendasikan:

1. Agar KPB melakukan koreksi pencatatan atas Bangunan Gedung Kantor Permanen lebih dari satu NUP dengan terlebih dahulu dilakukan Inventarisasi Mandiri, dan mengusulkan PSP.
2. Agar KPB melakukan update profil aset dan keterangan pendukung di master aset pada aplikasi SIMAN.
3. Agar KPB mengajukan sertifikat atas tanah yang dikuasai, mengajukan PSP, update SBSK sesuai dengan kondisi riil dan update profil aset pada aplikasi SIMAN.
4. Agar KPB melakukan update Rumah Negara sesuai dengan kondisi rill, menyajikan SBSK, mengupdate profil aset Rumah Negara.
5. Agar KPB mengajukan alih fungsi jika diperlukan bagi kendaraan dinas jabatan yang sudah digunakan lebih dari 5 tahun perolehan sesuai dengan PMK 172/2020, update kondisi, update PSP dan mengajukan usulan penghapusan jika sudah melebihi SBSK untuk kendaraan operasional yang sudah diberhentikan dari operasional.
6. Agar KPA melaksanakan pengadaan sesuai dengan RUP yang sudah diumumkan, mengupdate data pelaksanaan kontrak pada fitur Evaluasi Pengadaan di aplikasi e-Sadewa secara berkala.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Padang, April 2023 |
| (……Nama Satuan Kerja…….) | Tim Biro Perlengkapan, |
| Sekretaris/  (……..Nama…….)  NIP. | (Marwendi Putra, ST., MM)  NIP. 19760314 200604 1 002 |
| Operator BMN/  (……..Nama…….)  NIP. | (Eko Prihanto, SH., MH)  NIP. 19841228 200502 1 001 |